

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALEMBANG

Anton Trianto

Katon_at@yahoo.com

Dosen Tetap Yayasan Perguruan Sjakhyakirti Palembang

ABSTRACT

Human development is an important part of a series of processes undertaken by a country or region to change for the better future. Human Development Index (HDI) becomes one of the benchmarks in assessing the success of human development. To support human development government must allocate an effective public budget. This study aims to see how the effect of capital expenditure on increasing HDI in Palembang City. The data used is the primary data for the period of 2013-2016. The analysis technique is simple regression analysis of two variables, namely HDI as dependent variable and capital expenditure (lag 1) as independent variable. The result shows that capital expenditure has a significant influence on the increase of HDI.

Keywords: Capital Expenditure, Human Development Index

1. LATAR BELAKANG

Menurut Subandi (2014: 9), pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.

Menurut Lincoln (2010: 25), indikator keberhasilan pembangunan terdiri dari dua jenis yaitu: indikator moneter dan indikator non moneter. Indikator-indikator non moneter yang dikemukakannya berhubungan dengan proses pembangunan manusia dan kualitas kehidupannya.

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*.

Sebelumnya IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu: angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Namun kemudian BPS mengubah perhitungan IPM menggunakan metode baru yang dibentuk berdasarkan empat indikator yang disempurnakan yaitu: angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan kemampuan daya beli melalui pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS, 2015).

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing

dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju (BPS, 2008).

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian peranan penting menjadi milik pemerintah dalam hal kewenangan merealisasikan dan menentukan alokasi belanja yang tepat bagi kepentingan sarana-sarana yang mempengaruhi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Menurut Christy dan Adi (2009), pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasibelanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran. Dalam era otonomi daerah, belanja daerah menjadi wewenang penuh dari pemerintah daerah setempat. Menurut Mirza (2012), Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Belanja daerah dibagi dalam dua klasifikasi yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang telah dianggarkan (Vegirawati, 2012: 66).

Salah satu pos belanja yang paling penting dalam kelompok anggaran belanja langsung adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aktiva tetap lainnya (Bastian, 2014: 45-50).

Secara teori, peningkatan belanja modal berarti terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dalam hal pengadaan infrastruktur yang mendukung program-program pemerintah yang memiliki sasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, belanja modal memiliki peran penting dalam memperlancar proses pembangunan manusia di suatu daerah.

Kota Palembang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kualitas pembangunan manusia yang cukup baik. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Palembang tumbuh menjadi pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera Selatan. Jika dinilai dari angka IPM maka Kota Palembang selalu menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera Selatan. Berikut ini Tabel 1 yang menggambarkan IPM dan Realisasi Belanja Modal Kota Palembang selama periode 2003-2016.

TABEL 1
IPM dan Realisasi Belanja Modal Kota Palembang 2010-2016

TAHUN	IPM	BELANJA MODAL (Rupiah)
2010	73,33	139,299,392,434.00
2011	74,08	358,928,949,198.25
2012	74,74	397,764,043,754.00
2013	75,49	678,418,238,179.00
2014	76.02	618,997,307,236.42
2015	76.29	628,995,346,843.94
2016	76.59	577,697,336,830.45

Sumber: Diolah dari data BPS 2010-2016

Berdasarkan tabel 1 di atas, angka IPM kota Palembang relatif terus meningkat setiap tahun pada periode 2010-2016 seiring dengan peningkatan realisasi belanja modal yang dikeluarkan pemerintah Kota Palembang. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan langsung antara peningkatan pengeluaran pemerintah untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Palembang.

Tabel 2 berikut ini menggambarkan perbandingan IPM Kota Palembang dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan.

TABEL 2
Perbandingan IPM Kota Palembang Dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ogan Komering Ulu	64.13	64.62	65.09	65.51	66.21	67.18	67.47
Ogan Komering Ilir	61.04	61.68	62.29	63.52	63.87	64.73	65.44
Muara Enim	62.12	62.82	63.34	64.34	65.02	65.82	66.71
Lahat	62.31	62.93	63.66	64.15	64.52	65.25	65.75
Musi Rawas	59.69	60.63	61.37	62.23	63.19	64.11	64.75
Musi Banyuasin	61.79	62.56	63.27	64.18	64.93	65.76	66.45
Banyuasin	60.31	61.04	61.69	62.42	63.21	64.15	65.01
Ogan Komering Ulu Selatan	58.88	59.74	60.63	61.58	61.94	62.57	63.42
Ogan Komering Ulu Timur	63.36	64.27	65.18	66.09	66.74	67.17	67.38
Ogan Ilir	61.62	62.47	63.03	63.64	64.49	65.35	65.45
Empat Lawang	61.11	61.86	62.3	62.74	63.17	63.55	64
Pali	-	-	-	59.69	59.89	60.83	61.66
Musi Rawas Utara	-	-	-	60.56	61.34	62.32	63.05
Palembang	73.33	74.08	74.74	75.49	76.02	76.29	76.59
Prabumulih	69.39	70.32	70.95	71.87	72.2	73.19	73.38
Pagar Alam	61.97	62.71	63.33	64.14	64.75	65.37	65.96
Lubuk Linggau	70.72	71.62	72.04	72.55	72.84	73.17	73.57
Sumatera Selatan	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24

Sumber: Data BPS, 2018

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa IPM Kota Palembang selalu menjadi yang tertinggi di Sumatera Selatan dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. IPM Kota Palembang selama periode 2010-2016 masuk dalam kategori tinggi yaitu berada pada kategori angka 70-80.

Tabel 3 berikut ini menggambarkan perkembangan 4 indikator IPM di Kota Palembang selama periode 2010-2016.

TABEL 3
Perkembangan Indikator IPM Kota Palembang Tahun 2010-2016

TAHUN	ANGKA HARAPAN HIDUP	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH	PENGELUARAN PER KAPITA
	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)	(Rupiah)
2010	69.76	9.96	12.69	12,295.01
2011	69.78	9.98	12.93	12,654.45
2012	69.79	10.39	13.14	12,962.29
2013	69.8	10.19	13.34	13,392.88
2014	69.8	10.36	13.67	13,623.95
2015	70	10.2	13.7	13,784.85
2016	70.46	10.35	13.71	13,981.00

Sumber: Diolah dari data BPS, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya peningkatan relatif terhadap nilai-nilai pada masing-masing indikator IPM Kota Palembang selama periode 2010-2016. Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang menggambarkan bagaimana tingkat kualitas kesehatan masyarakat Kota Palembang pada umumnya. Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kualitas pendidikan masyarakat Kota Palembang pada umumnya, sedangkan pengeluaran per kapita adalah angka yang menggambarkan paritas daya beli masyarakat Kota Palembang. Peningkatan yang relatif konsisten terhadap indikator-indikator IPM yang ditunjukkan pada Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa adanya kemajuan yang dicapai oleh Kota Palembang dalam proses pelaksanaan pembangunan manusianya. Patut diduga bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan tersebut adalah efektifitas dalam pengelolaan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Belanja Daerah dan Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

Belanja daerah dibagi dalam dua klasifikasi yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aktiva tetap lainnya (Bastian, 2014: 45-50).

2.1.2. Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah sebuah proses untuk memperluas pilihan bagi masyarakat – yaitu agar mereka dapat memperoleh lebih banyak kemampuan dan menikmati lebih banyak kesempatan untuk menggunakan kemampuan tersebut. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses

sekaligus hasil yang dituju. Pembangunan manusia mengimplikasikan bahwa masyarakat harus mempengaruhi proses yang membentuk hidup mereka. Untuk itu, proses pertumbuhan ekonomi adalah memang sebuah sarana yang penting untuk perkembangan bagi pembangunan manusia, tetapi tidak menjadi tujuan utama. Pembangunan manusia adalah pengembangan masyarakat melalui pembangunan kemampuan manusia, agar masyarakat mampu meningkatkan kehidupan mereka melalui partisipasi melalui aktif dalam proses yang membentuk kehidupan mereka. Konsep ini adalah pendekatan yang lebih luas daripada pendekatan lain, seperti misalnya manusia pendekatan sumber daya, pendekatan kebutuhan dasar atau pendekatan kesejahteraan manusia (UNDP, 2015: 2).

Menurut Bhardwaj, et al (2012), Pembangunan Manusia adalah studi tentang bagaimana orang berkembang pada tingkat fisik, intelektual dan juga sosial. Konsep ini menjabarkan berbagai tahap kehidupan agar lebih bisa dipahami bagaimana orang bekerja. Konsep pembangunan manusia yang lebih luas ini pertama kali dikemukakan oleh Amartya Sen, seorang pemenang Nobel tahun 1998. Karya Amartya Sen dan karya pemikir lainnya meletakkannya dasar pendekatan yang berbeda untuk makna pembangunan manusia yang lebih luas. Konsep pembangunan manusia kemudian berkembang menjadi sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas pilihan masyarakat dan meningkatkan kemampuan (berbagai hal yang dapat mereka lakukan untuk kehidupan) serta kebebasannya sehingga mereka bisa hidup lama dan sehat, memiliki akses ke pendidikan dan standar hidup yang layak, serta mampu berpartisipasi dalam kelompok mereka dan mempengaruhi keputusan dalam kehidupan mereka.

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut BPS (2008: 9), IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan

Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Sebelumnya IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu: angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Namun kemudian BPS mengubah perhitungan IPM menggunakan metode baru yang dibentuk berdasarkan empat indikator yang disempurnakan yaitu: angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan kemampuan daya beli melalui pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS, 2015).

Penyempurnaan perhitungan IPM yang dibuat pada tahun 2014 oleh BPS antara lain adalah:

1. Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi 2011.
2. Mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.
3. Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.

Variabel dalam IPM Metode Baru adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy - e0*)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

2. Rata-Rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk

yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

3. Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan *Metode Rao* (BPS, 2015)

Tabel 3 berikut ini menggambarkan perbandingan antara perhitungan IPM metode lama dan metode baru.

Tabel 4
Perbandingan IPM Metode Lama dan Baru

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Aritmatik $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran}) \times 100$		Rata-rata Geometrik $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia
(<http://ipm.bps.go.id/page/ipm>)

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel 4 yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Tabel 5
Nilai Minimum dan Maksimum Indikator IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US)	26.572.352** (Rp)

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia
(<http://ipm.bps.go.id/page/ipm>)

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. $IPM < 60$: IPM rendah
2. $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang
3. $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi
4. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi

2.2. Penelitian Terdahulu

Vegirawati (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah diproses oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui situs web. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi sederhana menggunakan SPSS versi 16.0. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara alokasi belanja langsung ke kualitas pengembangan manusia yang diukur dengan menggunakan IPM.

Mirza (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah tahun 2006-2009 dan menganalisis seberapa besar pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga

mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan hasil regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kesimpulannya bahwa perkembangan IPM mengalami peningkatan selama tahun 2006-2009, kemiskinan berpengaruh negatif, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif.

Badrudin dan Khasanah (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola APBD khususnya untuk alokasi belanja publik yaitu anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk manusia berkembang di Provinsi DIY berdasarkan data tahun 2004-2008 Metode yang digunakan untuk menganalisis hipotesis adalah analisis regresi dengan tingkat keyakinan sebesar lima persen ($\alpha = 5\%$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia dengan memakai *time lag* 2 dan 3 tahun.

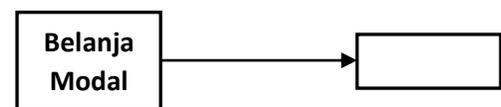
Astri, *et al* (2013), meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan pengeluaran pemerintah di Indonesia khususnya jangka waktu 2007-2008 dengan metode statistik inferensial (induktif). Jenis data yang digunakan adalah *data time series*, dengan data sekunder yang dipublikasi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan lembaga lainnya. Pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 17.0. Hasil dari persamaan regresi berganda yang didapat dalam penelitian ini adalah $Y = 42,955 + 0,902\text{Ln}X1 + 0,198\text{Ln}X2$. Dari Uji F pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, F

hitung adalah sebesar 6,074 sedangkan F tabel adalah sebesar 3,171626 maka $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$. Artinya terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara serentak. Kesimpulan yang sama terjadi pada uji signifikansi dan nilai *sig.* Yang didapat adalah 0,004 dari hasil tersebut bahwa *sig.* lebih kecil dari α maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk uji t, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM ($t \text{ hitung } 3,023 > t \text{ tabel } 1,674116$), namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM ($t \text{ hitung } 0,412 < t \text{ tabel } 1,674116$). Selain itu, terlihat bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,186, artinya seluruh variabel bebas (pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan) dapat menjelaskan variabel terikat (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 18,6%. Sedangkan sisanya sebesar 81,4% diterangkan oleh variabel lain.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1
Bagan Kerangka Pemikiran



Berdasarkan bagan di atas, penelitian ini membahas tentang bagaimana alokasi belanja modal pada APBD Kota Palembang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui penilaian terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dipakai untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja modal yang dialokasikan pemerintah Kota Palembang terhadap peningkatan IPM.

2.4. Hipotesis

Hipotesis yang dibangun pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ho = Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM
2. H1 = Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan ruang lingkup penelitian terletak pada pembahasan tentang pengaruh alokasi belanja modal pada APBD Kota Palembang terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang. Periode data yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2003-2016.

3.2. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Tabel berikut ini menggambarkan definisi konseptual dan operasional variabel dalam penelitian ini.

TABEL 6
Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	Belanja Modal	Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aktiva tetap lainnya	Diambil dari pos Belanja Langsung pada APBD dengan satuan ukuran rupiah
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM merupakan indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> • Dihitung berdasarkan 4 indikator: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran perkapita yang disesuaikan. • Pengukuran IPM dengan menggunakan skala

3.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang melalui situs resminya (<https://palembangkota.bps.go.id>). Data yang digunakan adalah data belanja modal dan indeks pembangunan manusia Kota Palembang periode 2003-2016.

3.4. Teknik Analisis

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan Metode Ordinary Least Square (OLS) atau metode kuadrat terkecil melalui *software* SPSS 24. Model yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 BM + e \quad \dots (1)$$

Keterangan:

- IPM* = *Indeks Pembangunan Manusia*
- BM_{lag 1}* = *Belanja Daerah (lag 1)*
- β_0 = *Konstanta*
- β_1 = *Koefisien regresi*
- e* = *error term (variabel pengganggu)*

Penggunaan variabel lag 1 pada belanja modal terkait dengan pengujian asumsi klasik yaitu uji autokorelasi. Sebelum melakukan analisis regresi akan dilakukan uji asumsi klasik untuk memenuhi persyaratan asumsi klasik. Setelah analisis regresi dilakukan akan dilakukan uji hipotesis melalui uji t statistik.

3.4.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil regresi yang digunakan untuk memprediksi variabel terkait tidak bias. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normalitas, heterokedastisitas, autokorelasi.

3.4.1.1. Normalitas

Uji asumsi normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian ini menggunakan pendekatan grafik *Normal P-P of Regression Standardized Residual*. Dasar

pengambilan keputusan adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka memenuhi asumsi normalitas.

3.4.1.2. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah kondisi di mana varian dari residual (*error*) tidak konstan dan berubah-ubah. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik plot (*scatter plot*). Jika gambar tersebar tidak merata dan tidak membentuk suatu pola berarti model regresi bebas heteroskedastisitas.

3.4.1.3. Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan di mana terjadinya korelasi antara waktu *t* dengan waktu sebelumnya (*t-1*). Autokorelasi hanya dapat terjadi pada regresi yang menggunakan data rentang waktu (*time series*). Autokorelasi dapat dideteksi dengan melihat angka Durbin-Watson (*DW*) dan membandingkannya dengan nilai *du* dan *dl* pada tabel statistik Durbin-Watson.

Pada pengujian awal dengan menggunakan variabel belanja modal, dideteksi adanya autokorelasi. Hal ini berarti menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara nilai belanja modal tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, akibatnya nilai IPM pada tahun berjalan lebih banyak dipengaruhi oleh alokasi belanja modal pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, variabel belanja modal ditransformasi menjadi variabel lag 1.

3.4.2. Uji Hipotesis (Uji t parsial)

Pengujian statistik secara parsial ditunjukkan untuk melihat apakah pengaruh variabel bebas signifikan dalam menjelaskan variabel terikat pada model regresi tersebut. Uji statistik parsial yang biasa disebut uji t dilakukan dengan membandingkan nilai *t* hitung yang ada pada output hasil regresi dengan nilai *t* pada tabel statistik *t*. Apabila nilai *t* hitung lebih besar daripada *t* pada tabel maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel bebas kuat dan signifikan terhadap variabel terikat. Uji *t* juga bisa dilihat dari nilai signifikansi pada tabel COEFFICIENTS hasil regresi. Apabila nilai

signifikansinya lebih kecil dari nilai alpha, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel bebas kuat dan signifikan terhadap variabel terikat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan analisis regresi linier sederhana maka model regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

$$IPM = 73,520 + 0,4523 BM_{lag1} + 0,305$$

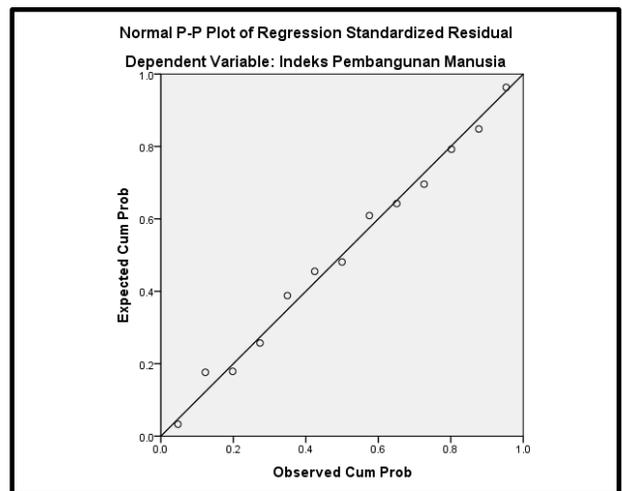
R Square = 0,736
t statistik = 5,536 (Sig. = 0.000)
Durbin-Watson = 1,946

Berdasarkan hasil regresi yang didapat, nilai koefisien determinasi (*R square*) adalah 0,656 yang artinya variabel bebas berpengaruh penting dalam pembentukan variabel terikat sebesar 73,6 %, sisanya sebanyak 26,4 % ditentukan oleh variabel lain di luar model regresi. Berdasarkan nilai koefisien regresi (nilai β) yaitu sebesar 0,4523 dapat disimpulkan bahwa kenaikan IPM sebesar 1 % didorong oleh kenaikan belanja modal sebesar 0,4523 %.

4.1. Uji Normalitas

Berikut ini Gambar 2 yang menggambarkan Normal P-P of Regression Standardized Residual dari hasil output regresi.

Gambar 2
Grafik Normal P-P of Regression Standardized Residual

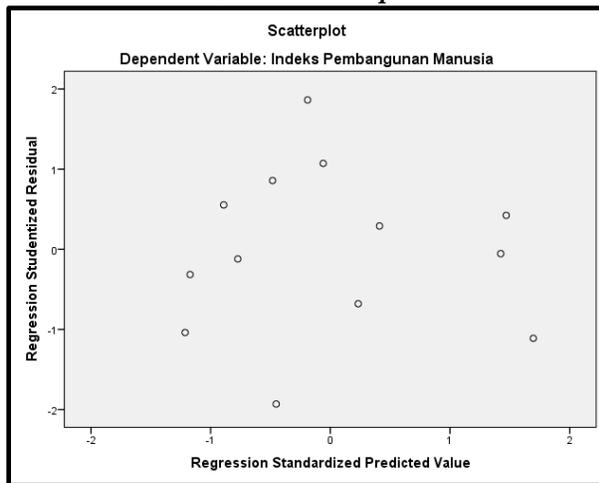


Berdasarkan gambar di atas terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi dengan normal dan memenuhi persyaratan asumsi normalitas.

4.2. Uji Heterokedastisitas

Berikut ini Gambar 3 yang menampilkan grafik scatterplot yang didapat dari output regresi.

Gambar 3
Grafik Scatterplot



Grafik *Scatterplot* di atas menunjukkan bahwa gambar titik-titik tersebar merata dan tidak membentuk suatu pola tertentu misalnya pola naik atau pola turun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heterokedastisitas dan memenuhi asumsi homokedastisitas.

4.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson (DW) pada output regresi dengan nilai *du* dan *dl* pada tabel. Jika nilai Durbin-Watson memenuhi kriteria $du < DW < 4 - du$ maka model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi (Nachrowi & Usman, 2006: 192).

Berdasarkan hasil regresi di atas didapati nilai Durbin-Watson (DW) adalah 1,946 sedangkan berdasarkan tabel statistik Durbin-Watson dengan nilai probabilita 0,05, jumlah n sebanyak 14, dan jumlah k sebanyak 1, didapati nilai *dl* = 1,045 serta nilai *du* = 1,3503. Dengan angka yang demikian

maka pengujian autokorelasi mencapai kriteria $du < DW < 4 - du$ ($1,3503 < 1,946 < 4 - 1,3503$) sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi.

4.4. Uji Hipotesis (uji t)

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	73.520	.305		241.428	.000
	BM_lag1	.452	.000	.858	5.536	.000

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) t pada tabel output regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sig. (0,000) lebih kecil dari nilai alpha/tingkat keyakinan sebesar 5 % ($0,000 < 0,05$). Hasil ini menjawab hipotesis dalam penelitian ini yakni bahwa variabel bebas yaitu belanja modal berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu peningkatan IPM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis regresi maka dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM Kota Palembang. Dengan kata lain, upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan program-program pembangunan manusia telah berjalan sesuai harapan terutama kaitannya dengan efektifitas pengalokasian belanja modal yang tepat sasaran untuk mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan khususnya pada program pembangunan manusia.

Kondisi seperti ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Palembang. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu upaya terbaik yang dapat dilakukan agar alokasi belanja modal dapat terus ditingkatkan untuk dapat mendukung penuh

program-program pembangunan manusia di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, Meylina, et al. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol.1 No. 1 Maret 2013 ISSN: 2302 – 2663*. FE UNJ. Jakarta.
- Badrudin, Rudy & Khasanah, Mufidhatul. 2011. Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi Vol. 9, No. 1, April 2011*. UPN Veteran. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2014. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Bhardwaj, Rahul, et al. 2012. Human Development. *International Journal of Scientific Research Engineering & Technology (IJSRET) Volume 1 Issue 5 pp 303-308 August 2012 ISSN 2278 – 0882*. (www.ijret.org/pdf/rahul_bhardwaj.pdf, diakses 15 April 2018)
- Badan Pusat Statistik. 2008. Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007. BPS Pusat. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia. (<http://ipm.bps.go.id/page/ipm> diakses 18 April 2018)
- Christy, Fhino Andrea & Adi, Priyo Hari. 2009. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Lincoln, Arsyad. 2010. Ekonomi Pembangunan. Penerbit STIE YKPN. Jakarta
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal Vol. 1 No, 1 2012 ISSN 2252-6560*. Universitas Semarang. Semarang.
- Nachrowi, Nachrowi D & Usman, Hardius. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. LP FE UI. Jakarta.
- Subandi. 2014. Ekonomi Pembangunan. Alfabeta. Bandung.
- UNDP. 2015. Human Development Report 2015 Work for Human Development. (http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf diakses 20 April 2018)
- Vegirawati, Titin. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota Di Sumatera Selatan). *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS) Vol. 2 No. 1 Januari 2012*. Redaksi Politeknik Palcomtech. Palembang.